

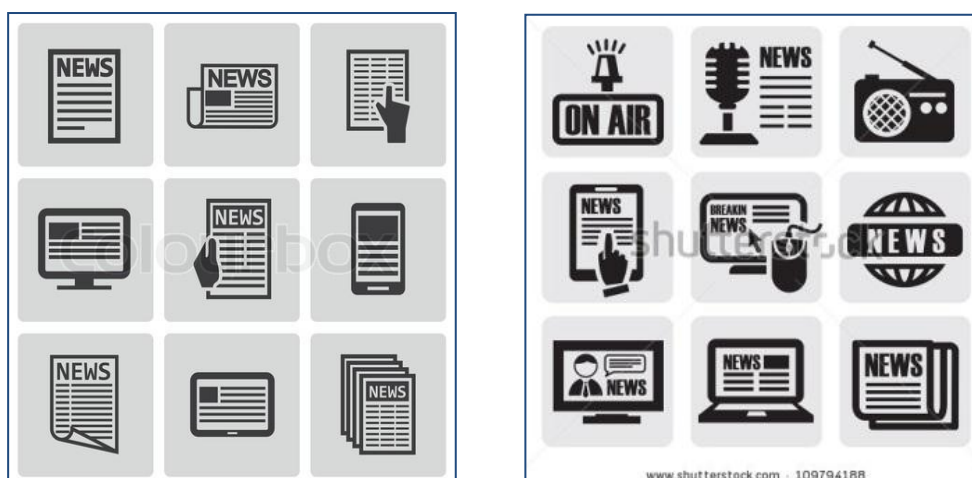


**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Ekonomi

Rabu, 24 September 2014



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jakarta, Bappenas
2014**

Daftar Isi

1. KETIMPANGAN MAKIN CEPAT (*Media Online Kompas*)
2. BERANI BONGKAR FISKAL (*Media Online Kompas*)
3. KESENJANGAN KAYA-MISKIN SEMAKIN MENGANGA (*Media Online Media Indonesia*)
4. UTANG BERLEBIH RAWAN KRISIS BERKEPANJANGAN (*Media Online Media Indonesia*)
5. PROGRAM UNGGULAN JOKOWI BUTUH ANGGARAN Rp. 300 TRILIYUN (*Media Online Indonesia Finance Today*)
6. ANGKA KEMISKINAN HANYA TURUN 0,7% DI 2012 – 2013 (*Media Online Indonesia Finance Today*)
7. PEMERINTAH BARU OPTIMISTIS PERTUMBUHAN EKONOMI CAPAI 7% (*Media Online Indonesia Finance Today*)
8. APBN 2015 DIPROYEKSIKAN DEFISIT 2,21% DARI PDB (*Media Online Indonesia Finance Today*)
9. PEMERINTAH ALOKASIKAN DANA KOMPENSASI Rp 5 TRILIYUN (*Media Online Indonesia Finance Today*)

Ketimpangan Makin Cepat

68 Juta Penduduk Rentan Jatuh Miskin

JAKARTA, KOMPAS — Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan menjadi tantangan terbesar. Tingkat penurunan kemiskinan terus melambat, yakni hanya 0,7 persen pada 2012-2013 atau terendah dalam 10 tahun terakhir. Kondisi itu diperparah dengan ketimpangan yang makin cepat.

Hal itu terungkap dalam Konferensi Bank Dunia "Big Ideas, Bersama Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan", di Jakarta, Selasa (22/9). Konferensi itu turut dihadiri Wakil Presiden Boediono dan wakil presiden terpilih 2014-2019 Jusuf Kalla.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A Chavez menilai, Indonesia telah berkembang pesat hingga menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang bergesang dalam kelompok 20 negara dengan produk domestik bruto terbesar di dunia.

Akan tetapi, menurut laporan Bank Dunia, pertumbuhan eko-

nomi Indonesia yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Penurunan sejak dua tahun lalu (2012-2013) hanya 0,7 persen. Sementara penurunan tingkat kemiskinan kurun 1999-2012 dari 24 persen menjadi sekitar 12 persen atau dari penghitungan *Alupus* setidaknya penurunan pada masa itu lebih dari 0,9 persen per tahun.

Dampak dari rendahnya penurunan tingkat kemiskinan itu, 68 juta penduduk Indonesia rentan jatuh miskin dengan pendapatan yang dalam keadaan darurat dapat dipenuhi cakupannya dengan adanya basis data terpadu. Pemerintah daerah sebagai ujung tombak penanggulangan kemiskinan perlu diberikan ruang untuk berperan aktif dalam pertemuan dan perbaikan program penanggulangan kemiskinan.

Sejak 2014 mulai diberlakukan sistem jaminan kesehatan yang mencakup semua penduduk Indonesia lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tahun 2015 akan siap-siapkan sistem perlindungan tenaga kerja nasional.

"Ini langkah besar menuju sistem proteksi sosial yang modern. Masih banyak pekerjaan rumah agar kedua sistem ini bisa berjalan efektif dan berkelanjutan," kata Boediono.

Terkait dengan masalah ketimpangan, Boediono mengatakan, Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi sumber ketimpangan yang jauh lebih beragam. Pertama, masih ada segmen-segmen yang belum tunduk kepada aturan hukum. Langkah mengatasi ketimpangan itu adalah penegakan hukum.

Kedua, segmen yang secara nominal sudah tunduk kepada hukum, tetapi aturan hukum belum sempurna dan berjalan baik sehingga pemburu rente masih tumbuh dengan memanfaatkan celah aturan hukum yang ada. Penanganannya membutuhkan reformasi hukum.

Ketiga, ketimpangan yang timbul dari aturan hukum yang tidak baik sehingga, walaupun aturan diterapkan dengan baik, hasilnya tidak akan baik. Perubahan rente masih bisa tumbuh. Aturan hukum itu merupakan produk proses politik sehingga pembetulan ketimpangan ini adalah perbaikan proses politik.

K keempat, apabila sumber ketimpangan sudah bisa diatasi, tetapi masih ada ketimpangan, perlu mengidentifikasi peran negara, termasuk kebijakan fiskal,

TANTANGAN INDONESIA PADA 2015



Kesulitan satu bangsa di Amerika Serikat

Hal ini akan menyerap aliran dana asing dari luar negeri, termasuk dari Indonesia. Untuk mencegah itu, BI telah akan diadopsikan. Akibat lanjutannya, perbankan nasional menaikkan tingkat suku bunga sehingga terancam investasi terhambat karena tingginya suku bunga kredit.



Kondisi ketidakpastian global

Negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi ("emerging market") patut diwaspadakan. Misalnya, Argentina mulai mengalami masalah fiskal dan inflasi tinggi. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya.



Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

Ber-tujuan memberikan peluang bagi negara anggota ASEAN, meningkatkan daya tarik tujuan investor dan wisatawan, serta memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis. Sayangnya, daya saing Indonesia masih rendah.



Sumber: Litbang Kompas/2013/101, data dari BPS, Kementerian Sekretariat Negara, dan sumber lain

untuk menyediakan peluang akses layanan publik, serta kesempatan maju bagi semua dan setiap warga negara. "Namun, jika semua upaya sudah dilakukan, tetapi ketimpangan masih juga ada, barangkali realitas itu harus kita terima," katanya.

La menilai, proses pembangunan yang fokusnya pada investasi dan manusia akan dapat mengatasi masalah ketimpangan.

Sementara itu, Jusuf Kalla mengemukakan, upaya mengatasi kemiskinan membutuhkan tindakan nyata yang berfokus mengurangi jumlah orang miskin. Kelompok warga miskin itu terdiri dari petani, nelayan, buruh, dan penganggur.

Jusuf Kalla menambahkan, diperlukan identifikasi masalah untuk mengatasi kemiskinan, yakni pendapatan dan konsumsi. Peningkatan produktivitas mem-bantu kebutuhan infrastruktur dan dukungan riset yang ditunjang oleh negara.

Kedua, pendapatan tetap, tetapi biaya hidup ditekuk. Upaya menekan biaya hidup antara lain sarana kesehatan dan pendidikan ditanggung pemerintah serta transportasi murah. Ketiga, pendapatan ditingkatkan dan biaya hidup ditekan.

Keempat, akses keuangan ditingkatkan. Salah satu upaya meningkatkan ruang fiskal adalah pengalihan subsidi bahan bakar minyak ke subsidi produktif untuk menekan kemiskinan.

"Negara punya uang, tetapi kerap salah peruntukan. Keuangan pemerintah harus diperbaiki dan pembiayaan diletakkan di tempat yang baik," katanya.

Peneliti Ihsan Mojojo menilai, persoalan itu harus diatasi dengan keputusan politik, implementasi program anti kemiskinan, dan koordinasi dari pelaksanaan program anti kemiskinan. (LRT/WHY/EGF)

Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan menjadi tantangan terbesar. Tingkat penurunan kemiskinan terus melambat, yakni hanya 0,7 persen pada 2012-2013 atau terendah dalam 10 tahun terakhir. Kondisi itu diperparah dengan ketimpangan yang makin cepat

Hashtag Berita :

#KesenjanganSosial #PertumbuhanEkonomiNasional #MEA(MasyarakatEkonomiAsean) #DayaSaing

Berani Bongkar Fiskal

RAPBN 2015 Tidak Membawa Perubahan Signifikan

JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 oleh pemerintah dan DPR periode 2009-2014 tidak membawa perubahan signifikan. Stimulus fiskal tetap minimalis. Pemerintahan baru harus berani membongkar fiskal agar menjadi stimulus ekonomi.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, A Tony Prasetyantono, dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, Ahmad Erani Yustika, secara terpisah, Selasa (23/9). Keduanya menanggapi postur APBN 2015 yang disepakati oleh Kementerian Keuangan selaku wakil pemerintah dan Badan Anggaran DPR, Senin malam.

Erani menyatakan, usaha efisiensi dalam pembahasan RAPBN 2015 antara pemerintah dan DPR patut diapresiasi. Namun, efisiensi itu belum menyentuh persoalan yang substantif. Efisiensi, misalnya, tidak menyasar anggaran belanja kementerian dan lembaga negara yang boros dan tum-

pang-tindih untuk direalokasikan ke program produktif. Padahal, nilainya diperkirakan Rp 100 triliun.

Menurut Erani, dari sisi penerimaan, belum ada terobosan progresif, baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak. Rasio pajak masih stagnan di 12 persen. Padahal, tahun depan, dengan adanya rencana penguatan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak sekaligus penegakan hukum sektor perpajakan, rasio pajak bisa mencapai 13 persen.

"Dengan perubahan minimalis ini, revisi APBN 2015 oleh pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo menjadi penting. APBN mesti menjadi stimulus fiskal. Ini tidak saja menyangkut besaran anggaran, tetapi juga yang tak kalah penting alokasi

anggaran untuk kegiatan produktif," kata Erani.

Tak ada perubahan

Secara terpisah, Tony berpendapat, tak ada perubahan signifikan antara RAPBN 2015 dan APBN 2015 yang disepakati. Persoalan dasar, seperti besarnya subsidi bahan bakar minyak (BBM), tetap tak teratasi. Ujung-ujungnya stimulus fiskal tetap saja minimalis.

"Saya belum melihat perubahan signifikan dalam APBN 2015. Subsidi BBM masih terlalu besar. Aspirasi presiden baru Jokowi juga belum tampak," kata Tony.

Kenaikan harga BBM guna memperbaiki fiskal, menurut Tony, menjadi keniscayaan. Langkah itu sebaiknya dilakukan pada November 2014 mengingat momentum terbaik pada September 2014 tidak mau dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Inflasi November biasanya landai.

Sebelumnya Menteri Keuangan M Chatib Basri menyatakan, salah satu poin penting APBN 2015 hasil kesepakatan pemerintah dan DPR adalah defisit yang lebih kecil daripada versi nota keuangan. Berdasarkan ver-

si nota keuangan, defisit sebesar Rp 257,6 triliun atau 2,32 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit APBN 2015 disepakati Rp 245,9 triliun atau 2,21 persen terhadap PDB.

Sementara itu, dalam seminar yang diselenggarakan Lembaga Penjamin Simpanan, Selasa, di Jakarta, para pembicara, yakni Guru Besar International Financial System Harvard Kennedy School (AS) Carmen M Reinhart, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan penganut ekonomi Unika Atma Jaya, Jakarta, A Prasetyantoko, mengatakan, negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan yang kian berat tahun depan. Harga komoditas akan stagnan atau cenderung turun karena permintaan global melambat.

Reinhart mengungkapkan, era komoditas berakhir awal 2013. Negara-negara berkembang kini mengalami tekanan inflasi dan masuknya modal asing secara masif. "Setelah kondisi ekonomi yang menguntungkan negara berkembang berakhir 2014, saatnya negara berkembang bersiap menghadapi tantangan yang berat ke depan," ujarnya.

(LAS/AHA)

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 oleh pemerintah dan DPR periode 2009-2014 tidak membawa perubahan signifikan. Stimulus fiskal tetap minimalis. Pemerintahan baru harus berani membongkar fiskal agar menjadi stimulus ekonomi

Hashtag Berita :

#APBN2015

#TransisiPemerintahan

#PenerimaanNegara

#SubsidiBBM

#ProdukDomestikBruto(PDB) #Inflasi #Investor #KementerianKeuangan

Kesenjangan Kaya-Miskin semakin Menganga

Kebijakan publik yang efektif, kemitraan dengan swasta dan masyarakat sipil menjadi kebijakan substansial dalam mengatasi kesenjangan.

EMIR CHAIRULLAH

Laporan Bank Dunia menyebutkan angka kesenjangan antara kaum kaya dan miskin di Indonesia meningkat. Walaupun upaya mengatasi kemiskinan mengalami kemajuan, Indonesia menjadi salah satu negara dengan ketimpangan tercepat di Asia Timur.

"Ketimpangan dan mengatasi kemiskinan merupakan tantangan paling penting bagi pemerintah mendatang. Ketimpangan ini yang membuat masyarakat miskin sulit keluar dari kemiskinan," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A Chavez saat Konferensi Penanggulangan Kemiskinan di Jakarta, kemarin. Hadir sebagai pembicara utama dalam konferensi tersebut Wakil Presiden Boediono.

Lebih lanjut Chavez menjelaskan, meskipun terjadi penurunan kemiskinan, angka penurunannya hanya 0,7% selama periode 2012-2013. Tingkat penurunan itu merupakan yang terkecil dalam satu dekade terakhir. Walaupun diakui Indonesia berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dari 24% pada 1999 menjadi 11,3% pada 2013. "Ketimpangan dan melambatnya penurunan kemiskinan ini berpotensi menciptakan konflik sosial. Hal ini mengurangi manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir," ujarnya.

Ia menyebutkan saat ini angka koefisien Gini atau alat untuk mengukur ketimpangan konsumsi di Indonesia

sekitar 0,41 atau meningkat dari 0,30 pada 2000. Kesenjangan itu terutama terjadi antara wilayah Jawa dan wilayah lainnya, seperti Indonesia Timur. "Karena itu, implementasi kebijakan publik yang efektif, membangun kemitraan dengan swasta dan masyarakat sipil akan menjadi kebijakan substansial untuk dijalankan," ungkapnya.

Tantangan

Saat membacakan pidato, Wapres Boediono mengakui bentuk-bentuk ketimpangan ekonomi dan sosial bisa terjadi di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Pasalnya, tantangan ketimpangan di negara berkembang lebih beragam ketimbang negara maju. "Di negara berkembang, sumber ketimpangan banyak terjadi," ujarnya.

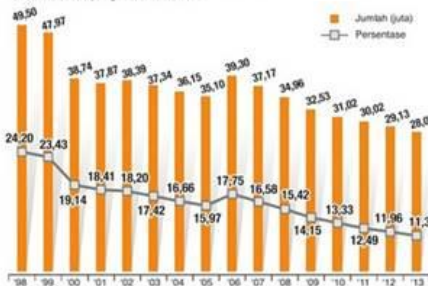
Ia menyebutkan sejumlah alasan telah menyebabkan ketimpangan itu terjadi. Pertama, masih banyak pihak yang belum taat pada hukum yang berlaku. "Kondisi ini seperti *wild west*. Obat mujarab untuk mengatasi ketimpangan ini ialah penegakan hukum," ujarnya.

Kedua, muncul segmen-segmen yang secara nominal yang sudah tunduk pada hukum, tetapi aturan-aturan hukum yang ada belum sempurna dan belum sepenuhnya berjalan baik, sehingga kegiatan *rent seeking* masih tumbuh subur di celah-celah aturan hukum yang ada.

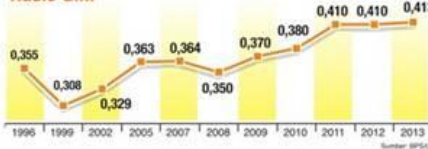
Ketiga, aturan hukum yang tidak baik, yang meskipun diterapkan dengan baik, hasilnya tetap tidak

Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Jumlah orang miskin turun, tetapi tingkat ketimpangan pendapatan semakin lebar antara si kaya dan si miskin. Ketimpangan itu semakin tinggi terlihat dari rasio Gini yang semakin besar.



Rasio Gini



baik. Di sini, *rent seeking* masih bisa tumbuh.

Apabila ketiga sumber ketimpangan itu sudah dapat diatasi dan ternyata masih ada ketimpangan, kata Wapres, jalan yang terbuka ialah mengefektifkan peran negara, termasuk peran kebijakan fiskalnya.

Terakhir, ungkapnya, apabila semua itu sudah dilakukan, tapi masih juga

terjadi ketimpangan, barangkali realita itu harus diterima. Bagi Boediono, amat mungkin ketimpangan itu disebabkan perbedaan kemampuan setiap orang. "Ketimpangan semacam itu menurut pandangan saya justru dapat menjadi sumber kemajuan," pungkasnya. (X-7)

emir@mediaindonesia.com

Kebijakan Publik yang efektif, kemitraan dengan swasta dan masyarakat sipil menjadi kebijakan substansial dalam mengatasi kesenjangan

Hashtag Berita :

#KesenjanganSosial #PendapatanMasyarakat #PertumbuhanEkonomiNasional



Utang Berlebih Rawan Krisis Berkepanjangan

GURU Besar Universitas Harvard Carmen M Reinhart mengingatkan pemangku kepentingan sektor finansial di Tanah Air untuk mengantisipasi krisis yang mungkin terjadi saat suku bunga The Fed naik dan utang valas tergolong tinggi. "Karena selama ini penyebab utama krisis ialah rasio utang tinggi, dari dalam maupun luar negeri," ujar Reinhart pada Seminar Internasional *Befriending with the 'Boom-Bust' Cycle*, di Jakarta, kemarin.

Dia mencontohkan perihal krisis global 2007-2009 yang dimulai dari krisis kredit perumahan di AS dan kemudian merambat ke berbagai penjuru dunia. Dari krisis-krisis sebelumnya yang juga pernah timbul pada 1991, 1999, ia berkesimpulan utang ialah salah satu penyebab krisis jadi berkepanjangan. "Dengan mengurangi rasio utang akan menekan kebutuhan dolar, terutama ketika pasar uang AS lebih menarik karena suku bunga acuannya naik nanti."

Utang yang ia maksud bukan hanya utang pemerintah dan korporasi, melainkan juga utang individu atau rumah tangga. Maka, pemerintah perlu memperhatikan risiko sistemik dari pergerakan kurs dan meninjau kebijakan seperti *loan to value*, pembatasan laju kredit, dan sebagainya. Aliran dana investasi

langsung asing, modal, serta pengembangan sektor spesifik, seperti industri dan keuangan juga perlu dicermati.

Pada saat ini, imbuh Reinhart, dunia memang tidak dalam masa mengawali krisis. Namun, semua pihak perlu mempersiapkan diri menghadapi segala gejala yang mungkin terjadi.

Menteri Keuangan Chatib Basri yang hadir dalam seminar itu sepakat negara-negara *emerging market*, termasuk Indonesia, harus waspada dengan perubahan suku bunga AS, sebab ada risiko *capital outflow*. Hal itu pun harus dicermati perbankan yang kini tengah mengalami likuiditas ketat.

Persiapan lain yang dapat dilakukan dalam menghadapi tantangan global yakni dengan pengetatan fiskal. "Pengetatan fiskal mungkin akan terus dilanjutkan, kami yakin itu akan mengurangi defisit anggaran," ujar Chatib.

Lalu langkah kedua menghadapi gejala ekonomi global ialah dengan memperbanyak sumber pendanaan domestik. Akan tetapi, pada postur RAPBN 2015, pagu utang luar negeri justru naik menjadi Rp23,8 triliun. Untuk menekan sumber pembiayaan dari asing, Chatib mengemukakan sedang ada penyusunan aturan baru. "Caranya sedang dipersiapkan oleh BI." (Ire/E-2)

Finansial di Tanah Air untuk mengantisipasi krisis yang mungkin terjadi pada suku bunga The Fed naik dan utang valas tergolong tinggi. penyebab krisis utama ialah rasio utang tinggi dari dalam maupun luar negeri

Hashtag Berita :

#StabilitasEkonomiNasional

#KementerianKeuangan

#ValutaAsing

#Investor

#UtangLuarNegeridanDalamNegeri

subscribe dan download aplikasi Android & iOS di : www.ft.co.id

DECIDE NOW

Untuk berlangganan koran Indonesia Finance Today hubungi: 021-700 95499

idea
Bloomberg TV
Bloomberg Businessweek

INDONESIA FINANCE TODAY

DECIDE NOW

Rabu, 24 September 2014

Halaman 6, Kolom 1-4

Program Unggulan Jokowi Butuh Anggaran Rp 300 Triliun

Kebutuhan anggaran yang cukup besar tersebut rencananya dapat dipenuhi dari berbagai dana optimalisasi seluruh kementerian/lembaga.

Dusep Malik

JAKARTA - Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla mengakui membutuhkan dana lebih dari Rp 300 triliun untuk mengerjakan sembilan program unggulan di bidang infrastruktur dan upaya pengentasan kemiskinan yang belum masuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015.

Dolfie O.F.P., Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, mengatakan kebutuhan anggaran yang cukup besar tersebut rencananya dapat dipenuhi dari berbagai dana optimalisasi seluruh kementerian/lembaga yang nilainya dapat mencapai Rp 600 triliun dari belanja RAPBN 2015 sebesar Rp 2.019 triliun.

Menurut Dolfie, sembilan program unggulan tersebut adalah modernisasi pasar, peningkatan kualitas rumah sakit dan puskesmas, menambah Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pendidikan wajib belajar 12 tahun, infrastruktur untuk mempercepat kedaulatan pangan dan infrastruktur dasar untuk perekonomian.

"Yang jelas totalnya lebih dari Rp 300 triliun untuk sembilan program Nawa Cita tahun depan. Dana itu sementara belum ada karena APBN 2015 masih Kementerian lama, maka nanti ada penajaman pada awal Januari 2015 di pembahasan APBN perubahan yang kita bisa utak-atik kira-kira mencapai Rp 600 triliun," tegasnya.



Pemerintah baru diperkirakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp300 triliun untuk mewujudkan sembilan program unggulan infrastruktur. foto: istiqbal

Dolfie menambahkan, dana optimalisasi tersebut ke depan juga masih harus dilihat apakah bisa mengakomodir seluruh program presiden terpilih, sehingga opsi lainnya seperti menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi opsi paling akhir yang akan diambil.

Rini Soemarno, Kepala Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, mengatakan opsi untuk menambah alokasi anggaran dari kenaikan harga BBM subsidi sebenarnya masih terus dikaji, sebab yang paling utama adalah bagaimana mengalihkan subsidi tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan.

Program-program yang masih disiapkan tersebut antara lain program yang produktif di pedesaan yang utamanya menyediakan lapangan kerja dan kebutuhan pedesaan seperti irigasi serta pembangunan air bersih. Semua program tersebut nantinya dapat member-

dayakan masyarakat dan membantu tambahan pendapatan.

"Program-programnya ya kita sudah siapakan. Mandatorinya itu tadi program-program yang produktif untuk masyarakat yang membutuhkan terutama pedesaan. Selain itu, ada program untuk siswa yang putus sekolah dan program kesehatan yang lebih menyeluruh yang belum ada di BPJS," terangnya.

Dedy Supriadi Priyatna, Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, sebelumnya mengatakan dengan anggaran RAPBN 2015 untuk infrastruktur sebesar Rp 143,9 triliun maka ada gap kebutuhan anggaran bila melihat kebutuhan dari visi misi presiden terpilih.

Menurut dia, bila memasukkan visi misi presiden terpilih maka kebutuhan anggaran infrastruktur 2015 mencapai Rp 236,6 triliun atau ada gap kebutuhan anggaran sebesar Rp 92,7 triliun. Tambahan



Program Infrastruktur Jokowi-JK

I Infrastruktur dasar strategis

- 1 Perbaikan jalur selatan Jawa
- 2 Jalur penyebrangan ferry
- 3 Penuntasan jalur strategis tol trans Jawa
- 4 Perbaikan kualitas jalan lintas timur
- 5 Trans Kalimantan dan Sulawesi

II Bidang Konektivitas Laut

- 1 Tol laut (revitalisasi pelabuhan dan pembangunan kapal)

III Bidang Kelistrikan

- 1 Investasi transmisi dan pembangkit

IV Teknologi Informasi Komunikasi

- 1 Menyediakan bandwidth 1 Gb per bulan/kapita
- 2 Layanan e-government
- 3 Pembangunan pusat industri kreatif nasional berbasis IT

Sumber: Tim Humas

kebutuhan tersebut salah satunya berasal dari keinginan mencapai rasio elektrifikasi mencapai 100% pada 2019.

Fokus Penyerapan

Sementara itu, David Sumal, Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), mengatakan alokasi anggaran yang besar untuk kegiatan produktif harus diikuti dengan penyerapan anggaran yang lebih baik oleh pemerintah. Terlebih dari pengalaman sebelumnya para penanggung jawab proyek takut diaudit.

Untuk itu, ke depan penyerapan anggaran diharapkan tidak lagi besar di kuartal III dan IV. Pemerintah diharapkan bisa menyiapkan kelengkapan proyek, baik itu dokumen dan persiapan tender. "Ini masalah sepele tapi dampaknya besar, terlebih konsumsi mulai mengalami perlambatan saat ini," terangnya. ●

Kebutuhan anggaran yang cukup besar tersebut rencananya dapat dipenuhi dari berbagai dana optimalisasi seluruh Kementerian/Lembaga

Hashtag Berita :

#RAPBN2015 #TransisiPemerintahan #KomisiXIDPR #RKP(RencanaKerjaPemerintah)
#KenaikanHargaBBM #ProgramUnggulan

ANGKA KEMISKINAN HANYA TURUN 0,7% DI 2012 - 2013



DECIDE NOW

subscribe dan download aplikasi Android & iOS di : www.ift.co.id

Untuk berlangganan koran Indonesia Finance Today hubungi 021-700 95499

idea
Bloomberg
TV INDONESIA
Bloomberg
Businessweek

INDONESIA FINANCE TODAY

DECIDE NOW

Rabu, 24 September 2014

Halaman 6 Kolom 1-4

Angka Kemiskinan Hanya Turun 0,7% di 2012-2013

Dusep Malik

JAKARTA - Bank Dunia menyatakan penurunan angka kemiskinan Indonesia sepanjang 2012 - 2013 hanya 0,7%. Penurunan angka kemiskinan tersebut adalah yang terkecil dalam satu dekade terakhir, sehingga lambatnya penurunan tersebut menyebabkan angka ketimpangan pendapatan di masyarakat meningkat beberapa tahun terakhir.

Rodrigo A. Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, mengatakan ketimpangan pendapatan yang terus meningkat pada akhir tahun ini berpotensi menciptakan konflik sosial dan mengurangi manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi yang berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 11,3% pada 2014.

Menurut dia, kondisi itu menjadi tantangan berat bagi pemerintah baru sehingga implementasi kebijakan-kebijakan publik ke depan harus bisa lebih diefektifkan dengan membangun kemitraan bersama sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil.

Vivi Alatas, Ekonom Utama Bank Dunia, menambahkan meng-

Jumlah Penduduk Miskin & Tingkat Kemiskinan 2010 - 2014



*Per Februari
Sumber : Badan Pusat Statistik & Nota Keuangan RAPBN 2015

atasi kemiskinan dan ketimpangan ke depan tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi juga perlu satu proteksi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus didorong dengan pemerataan pendapatan.

Pemerataan pendapatan tersebut diyakini bisa membawa Indonesia ke luar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau *middle income trap*. Vivi mem-

berikan contoh pemerataan belanja negara yang lebih didorong pada pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat dan perlindungan sosial (*social protection*).

Vivi memperkirakan, pada 2020 dengan jumlah angkatan kerja baru Indonesia sebanyak 14,8 juta orang perlu suatu upaya agar pendapatan bisa merata, yaitu dengan meningkatkan produktifitas. Saat ini, Indonesia kekurangan tenaga ahli dan hanya mencetak sarjana baru tanpa keahlian yang dibutuhkan pasar.

Bank Dunia mencatat, hingga akhir tahun ini angka Gini Ratio yang mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat terus meningkat dari 0,30 pada 2000, menjadi sekitar 0,41 pada akhir 2013. Kesenjangan antar daerah pun tetap ada, Indonesia timur tertinggal dari wilayah lain Indonesia terutama Jawa.

Sementara itu, Boediono, Wakil Presiden menyatakan meningkatnya angka Gini Ratio dan kemiskinan di Indonesia disebabkan karena lima hal. Pertama, sebagai negara berkembang yang memiliki banyak segmen belum tunduk pada rule of law sehingga hanya bisa diselesaikan dengan penegakan hukum.

Kedua, sebagai negara berkembang berbagai segmen sudah tunduk pada hukum tapi belum sempurna sehingga perlu reformasi hukum. Ketiga, sebagai negara berkembang ada aturan hukum yang tidak baik meski diterapkan dengan baik, tetapi hasilnya tetap tidak baik. Hal ini hanya bisa diatasi dengan reformasi politik.

Lalu, yang keempat bila ketiga sumber ketimpangan itu sudah dapat diatasi tapi ketimpangan masih ada, maka jalan terbuka adalah mengefektifkan peran fiskal untuk menyelaraskan peluang dan kesempatan masyarakat untuk maju. Kelima, apabila semua sudah dilakukan tapi masih ada ketimpangan maka realita itu harus diterima, karena bisa jadi disebabkan *innate ability* masing-masing orang.

Peningkatan Riset

Sedangkan, Jusuf Kalla, Wakil Presiden terpilih, mengungkapkan agar kemiskinan dan ketimpangan bisa diturunkan, hal penting yang harus dilakukan adalah meningkatkan daya saing dengan cara meningkatkan riset-riset, dan kebijakan yang pro pada peningkatan bibit pertanian.

Hal-hal tersebut akan mengurangi angka kemiskinan sebab banyak membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. "Dengan riset maka daya saing masyarakat yang selama ini miskin meningkat dan dengan sendirinya kemiskinan turun," tegasnya. ●

Bank Dunia menyatakan penurunan angka kemiskinan Indonesia sepanjang 2012-2013 hanya 0,7% adalah terkecil dalam satu dekade, sehingga lambatnya penurunan kemiskinan menyebabkan angka ketimpangan pendapatan dimasyarakat

Hashtag berita :

#KesenjanganSosial

#PertumbuhanEkonomiNasional

#PendapatanMasyarakat

#KemiskinanStruktural

PEMERINTAH BARU OPTIMISTIS PERTUMBUHAN EKONOMI CAPAI 7%



DECIDE NOW

subscribe dan download aplikasi Android & iOS
di : www.ift.co.id



INDONESIA FINANCE TODAY

DECIDE NOW

Rabu, 24 September 2014Halaman 6, Kolom 1-4

Pemerintah Baru Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Capai 7%

Dusep Malik

JAKARTA - Pemerintah baru optimistis target pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7% pada 2015 - 2019 dapat dicapai. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Terpilih, mengungkapkan pertumbuhan tersebut dapat dicapai dengan terus meningkatkan produktivitas dalam negeri sehingga memiliki daya saing dengan kompetitor.

Menurut Jusuf Kalla, dengan berbagai sumber daya manusia dan sumber daya alam yang besar membuat Indonesia memiliki potensi untuk meningkat menjadi negara maju. Potensi tersebut sampai saat ini diakui masih belum tergali dengan baik sehingga perlu peningkatan riset dan perbaikan metodologi.

"Kita itu punya sumber-sumber ekonomi yang besar sehingga seharusnya kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi *double digit* seperti China yang mencapai 12%, masa dengan target 7% saja kita tidak bisa, tentu itu harus didukung dengan menaikkan produktivitas," terangnya, kemarin.

Jusuf Kalla menuturkan, meningkatkan produktivitas tentunya bisa dilakukan dengan berbagai riset sektor-sektor yang menjadi penopang ekonomi Indonesia seperti pertanian dan perikanan. Riset itu dibutuhkan karena melihat lahan atau sawah yang semakin sempit namun perlu pengembangan untuk hasil yang lebih besar.

Selain itu, peningkatan produktivitas juga perlu dikembangkan dengan mendorong sektor manufaktur yang dapat menyerap banyak lapangan kerja. Sektor tersebut saat ini diakui masih memiliki hambatan dan membutuhkan dukungan ketersediaan listrik dan infrastruktur pendukung

Dia menambahkan, selain terus mengejar produktivitas dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah baru juga harus bisa mengatasi masalah substansial yang selama ini dihadapi pemerintah yaitu mengatasi keinginan pihak-pihak tertentu yang ingin terus melakukan impor beras, gula dan produk lainnya.

Armida Salsiah Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, pemerintah baru perlu menyelesaikan hambatan (*the bottleneck*) dalam empat bulan pertama pemerintahan.

Masalah-masalah tersebut antara lain berbagai regulasi yang tumpang tindih dan peningkatan infrastruktur dasar.

Pengalihan Subsidi

Sementara itu, Josua Pardede, Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI), mengatakan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi jika masalah struktural yang dihadapi bisa diselesaikan lebih cepat yaitu dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Kenaikan harga BBM tersebut pada akhirnya memberikan kepercayaan pada pasar bahwa pemerintah serius memperbaiki masalah dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan peringkat investment grade dari Standard and Poor's (S&P). Dengan demikian maka investasi akan lebih ekspansif masuk ke Indonesia. ●

Pemerintahan baru optimistis target pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7% pada 2015-2019 dapat dicapai. Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengungkapkan pertumbuhan tersebut dapat tercapai dengan terus meningkatnya produktivitas dalam negeri, sehingga memiliki daya saing dengan kompetitor

Hashtag Berita :

#TransisiPemerintahan #PendapatanNegara #PertumbuhanEkonomiNasional
#MEA(MasyarakatEkonomiAsean) #DayaSaing #KenaikanHargaBBMBersubsidi

subscribe dan download aplikasi Android & iOS di : www.ift.co.id

DECIDE NOW

Untuk berlangganan koran Indonesia Finance Today hubungi 021-700 95499

idea
Bloomberg TV INDONESIA
Bloomberg Businessweek

INDONESIA FINANCE TODAY

DECIDE NOW

Rabu, 24 September 2014

Halaman 7, Kolom 1-5

APBN 2015 Diproyeksikan Defisit 2,21% dari PDB

Postur RAPBN 2015

Dalam triliun rupiah

	RAPBN	Kesepakatan Panja	Postur APBN
A. Pendapatan Negara	1.762,30	1.793,60	1.793,60
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.758,90	1.790,3	1.790,30
1. Penerimaan Perpajakan	1.370,80	1.380,00	1.380,00
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	388	410,3	410,3
II. Hibah	3,4	3,3	3,3
B. Belanja Negara	2.019,90	2.017,60	2.039,50
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.379,90	1.376,6	1.392,40
1. Belanja K/L	600,6	601,1	601,1
2. Belanja Non K/L	779,3	765,5	791,4
II. Transfer Daerah dan Dana Desa	640	647	647
C. Keseimbangan Primer	-105,5	-70,2	-93,9
D. Surplus/Defisit Anggaran	-257,6	-224	-245,9
% Defisit Terhadap PDB	-2,32	-2,01	-2,21
E. Pembiayaan (I + II)	257,8	273,8	245,9
% Pembiayaan Terhadap PDB	2,32	2,46	2,21
I. Pembiayaan Dalam Negeri	281,4	297,6	269,7
II. Pembiayaan Luar Negeri (netto)	-23,8	-23,8	-23,8
Kelamban (Kekurangan) Pembiayaan	0	0	0

Sumber: Hasil kesepakatan Badan Anggaran dengan Pemerintah

Pengurangan defisit ini menunjukkan bahwa pemerintah memberi ruang fiskal yang lebih besar untuk pemerintah baru.

Nurul Fitriyani

JAKARTA - Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat defisit anggaran pada 2015 sebesar 2,21% dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari kesepakatan panitia kerja (Panja) A sebesar 2,01%. Hal ini dikarenakan ada tambahan belanja prioritas Rp 8,2 triliun.

Dalam kesepakatan yang dibacakan oleh Tamsil Lirung, Wakil Ketua Banggar DPR RI, disebutkan postur APBN 2015 dengan defisit 2,21% ini, belum menyelesaikan panja belanja. Hingga berita ini diturunkan pembahasan belanja masih dilaksanakan. "Postur berdasarkan hasil panja pendapatan dan pembiayaan," terangnya.

Meski angka defisit yang disepakati tersebut lebih besar dibandingkan dengan kesepakatan Panja A, tetapi masih lebih rendah dibanding asumsi RAPBN 2015 yang diajukan pemerintah sebesar 2,32% atau senilai Rp 257,6 triliun, dengan belanja negara sebesar Rp 2.019,9 triliun dan pendapatan negara sebesar Rp 1.762,3 triliun.



Penerimaan negara 2015 diperkirakan lebih besar karena meningkatnya lifting minyak.

Andi Hadyanto, Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, menjelaskan pendapatan negara tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp 1.793,6 triliun dengan pendapatan perpajakan sebesar Rp 1.380,3 triliun dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 410,3 triliun. Penerimaan negara ini lebih tinggi dibandingkan dengan usulan dalam nota keuangan sebesar Rp 1.762,3 triliun.

Penerimaan yang lebih tinggi tersebut dikarenakan peningkatan lifting minyak, cost recovery, peningkatan laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta peningkatan PNBP migas dan cukai. "Sedangkan tax ratio sendiri, ditargetkan masih 12,38% hampir sama dengan target tahun ini," terangnya.

Dari sisi defisit anggaran, Andin mengatakan target defisit anggaran

yang lebih tinggi dari kesepakatan panja A, karena pemerintah menambahkan beberapa belanja prioritas sebesar Rp 8,2 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja cadangan perlindungan sosial untuk kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 5 triliun dan cadangan penyesuaian anggaran pendidikan sebesar Rp 3,2 triliun.

Penetapan tambahan belanja prioritas tersebut, belanja pemerintah pada 2015 meningkat menjadi Rp 2.039,5 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan kesepakatan panja A sebesar Rp 2.017,6 triliun dan usulan pemerintah dalam nota keuangan sebesar Rp 2.019,9 triliun. Belanja negara sebesar Rp 2.039,5 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.392,4 triliun dan trans-

fer daerah dan dana desa sebesar Rp 647 triliun.

Dengan pengurangan defisit anggaran, lanjut Andin, terjadi pengurangan penerbitan Surat Berharga Negara Sebesar Rp 27,9 triliun dan pembayaran bunga utang sebesar Rp 1,8 triliun.

Bambang PS Brodjonegoro, Wakil Menteri Keuangan II, menambahkan postur APBN tersebut masih angka sementara karena menunggu hasil pembahasan panja belanja. Pengurangan defisit ini menunjukkan bahwa pemerintah memberi ruang fiskal yang lebih besar untuk pemerintah baru.

"Paling tidak, yang penting ada efek mengurangi budget. Kenapa saya ngomong di situ karena saya lihat risiko normalisasi itu ada. Kalau ada rocking waters (air yang bergejolak), yang dilakukan jangan sampai financing kita tergantung. Karena itu defisitnya diperkecil, yang kedua dicari sumber pendanaannya," katanya.

Bambang mengatakan penerbitan SBN sudah diturunkan sebesar Rp 27,9 triliun dari usulan dalam nota keuangan. Ini dapat lebih rendah lagi jika pemerintah baru menurunkan subsidi BBM. Menurut Bambang, penurunan defisit sangat penting karena tekanan global akibat kebijakan normalisasi Bank Sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve/The Fed).

"Defisit kita perkecil supaya ketergantungan sama foreign financing jadi lebih kecil, kemudian source financing-nya dari domestik dengan begitu mitigasinya lebih mudah," tuturnya.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan untuk belanja terutama infrastruktur sangat bergantung dari pemerintah baru. Menurut Bambang, belanja yang akan ditetapkan pemerintah saat ini dengan DPR hanya sebatas baseline, tidak ada proyek baru yang akan dimasukkan.

Chatib menambahkan defisit anggaran yang lebih rendah ini, merupakan upaya yang cukup baik untuk mengurangi utang. Pertimbangan utama adalah risiko luar negeri yang cukup besar yaitu pengetatan likuiditas. ●

Pengurangan Defisit ini menunjukkan bahwa pemerintah memberi ruang fiskal yang lebih besar untuk pemerintah baru

Hashtag Berita :

#BanggarDPRRI

#ProdukDomestikBruto(PDB)

#RAPBN2015

#KebijakanFiskal

#StabilitasEkonomiNasional #KenaikanHargaBBMBersubsidi

PEMERINTAH ALOKASIKAN DANA KOMPENSASI Rp 5 TRILIYUN



INDONESIA FINANCE TODAY

DECIDE NOW

Rabu, 24 September 2014

Halaman 7, Kolom 1-5

Pemerintah Alokasikan Dana Kompensasi Rp 5 Triliun

Nurul Fitriany

JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan anggaran kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 5 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Kompensasi ini diperkirakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama tiga bulan jika pemerintah baru menaikkan harga BBM bersubsidi.

Chatib Basri, Menteri Keuangan, mengatakan pemerintah kembali mengalokasikan anggaran kompensasi BBM sebesar Rp 5 triliun sama seperti dalam APBN-P 2014. Anggaran tersebut, menurut Chatib, dialokasikan untuk bantuan langsung tunai selama tiga bulan seperti sebelumnya. "Jadi di APBN sudah ada Rp 5 triliun. Saya cuma baca di koran ada wacana naik BBM November, kalau naik BB? berarti ada kompensasinya? berarti harus ada kompensasi pada November dan Desember. Kalau kemudian dinaikkan tahun depan ada kompensasi sehingga disiapkan sekarang," terangnya.

Chatib mengatakan dengan adanya alokasi anggaran ini, pemerintah baru dapat menaikkan harga BBM tanpa takut berdampak ke masyarakat miskin, karena sudah ada kompensasi.

Chatib juga menjelaskan anggaran kompensasi ini tidak hanya untuk bantuan langsung tunai, namun

dapat berupa alokasi anggaran infrastruktur. "Semua tergantung pemerintah baru, mau dialokasikan kemana. Dan keputusan menaikkan (harga BBM) juga menjadi keputusan mereka (pemerintah baru) kita sudah siapkan saja," ujarnya.

Di sisi lain, Chatib berharap dalam APBN 2015 tidak ada pemotakan volume BBM dalam jumlah tertentu seperti tahun ini. Hal ini penting untuk mengantisipasi pe-

Kalau BBM naik sekitar 30% dana kompensasi yang dibutuhkan sebesar Rp 15 triliun. Kalau Rp 5 triliun mungkin hanya untuk cover dua bulan pertama pasca kenaikan saja.

ngkatan penjualan mobil. Selain itu, APBN-P juga diharapkan juga memberikan keleluasaan mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi.

Satya W Yudha, Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Golkar, mengatakan keputusan dikunci atau tidaknya volume BBM bersubsidi sangat tergantung dalam pembahasan draf Undang-Undang APBN 2015.

Menurut dia, yang ideal naik-

Perkembangan Harga Eceran BBM Bersubsidi 2006 - 2014

Dalam rupiah/liter

	1/1 2006-23/5 2008	24/5-30/11 2008	1/12-14/12 2008	15/12 2008-14/1 2009	15/1 2009-21/6 2013	22/6 2013 - sampai sekarang
• Premium	4.500	6.000	5.500	5.000	4.500	6.500
• Solar	4.300	5.500	5.500	4.800	4.500	5.500
• Minyak Tanah	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Sumber: Kementerian ESDM & Data Keuangan APBN 2015

kan harga BBM subsidi harus melalui rapat konsultasi dengan DPR terlebih dahulu. "Dulu kita buka opsi untuk menaikkan (harga) BBM bersubsidi tidak dilakukan, begitu opsi ditutup mereka mau menaikkan. Jadi lebih baik sekarang dibuat kenaikan dapat dilakukan setelah melakukan konsultasi dengan DPR," katanya.

Lana Soelistianingsih, Kepala Ekonom PT Samuel Asset Management, mengatakan keputusan mengalokasikan dana kompensasi kenaikan harga BBM sebesar Rp 5 triliun memang cukup tepat, sehingga tahun depan peluang untuk menaikkan harga BBM bersubsidi jauh lebih tepat.

Lana menilai jika kenaikan harga BBM subsidi dilakukan pada tahun ini kurang tepat, karena dana kompensasi dan perlengkapan administrasi lainnya perlu dipersiapkan sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

Lana memperkirakan dana kompensasi kenaikan harga BBM

sebesar Rp 5 triliun cukup untuk diberikan kepada penerima BLT yang berjumlah sekitar 15 juta orang. Namun pemerintah perlu menetapkan angka yang lebih valid.

Sementara itu, Destry Damayanti, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), mengatakan pengurangan subsidi sebesar Rp 4,6 triliun dari usulan yang diajukan pemerintah, hal ini menandakan bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM. Jika pemerintah akan menaikkan harga BBM subsidi maka ada penghematan anggaran, dimana setiap kenaikan harga BBM sebesar Rp 1.000 per liter akan ada penghematan sebesar Rp 46 triliun - Rp 47 triliun.

Destry mengatakan perlu ada keberanian dari pemerintah baru dalam memutuskan kebijakan BBM, karena target pembangunan infrastruktur pemerintah mendaat cukup besar seperti membangun tol laut, dan pertanian yang butuh dana cukup besar. " Kalau cuma penurunan Rp 4,6 triliun di

subsidi BBM itu sangat kecil berarti kalau kenaikan hanya sekitar Rp 1.000 per liter atau ini hanya sebuah pembatasan dan monitoring saja," kata Destry.

Destry mengatakan tidak ada pilihan lain, pemerintah baru harus menaikkan harga BBM bersubsidi. Jika pemerintah menaikkan harga BBM pada November tahun ini tidak perlu dikhawatirkan, karena masih ada dana kompensasi sebesar Rp 5 triliun, meski jumlahnya tidak terlalu besar. " Kalau BBM naik sekitar 30% dana kompensasi yang dibutuhkan sebesar Rp 15 triliun. Kalau Rp 5 triliun mungkin hanya untuk cover dua bulan pertama pasca kenaikan saja," terangnya.

Destry berharap kenaikan harga BBM dilakukan satu kali sehingga tidak akan menimbulkan ekspektasi berlebihan. Kenaikan minimal 30% atau sekitar Rp 2.000 per liter. "Tapi kalau lihat disparitas harga yang sudah tinggi maka minimal 50% lalu dua tahun lagi lihat perkembangan harga," jelasnya. •

Pemerintah mengalokasikan anggaran kompensasi kenaikan harga Bahan bakar minyak bersubsidi sebesar Rp. 5 Triliyun pada anggaran pendapatan belanja negara 2015. kompensasi ini diperkirakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) selama tiga bulan jika pemerintah baru menaikkan harga BBM bersubsidi

Hashtag Berita :

#RAPBN2015

#TransisiPemerintahan

#RKP(RencanaKerjaPemerintah)

#KenaikanHargaBBMBersubsidi